# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

**GUBERNUR ACEH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa tata cara penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dialokasikan dalam bentuk transfer;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, bahwa penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis belanja bantuan keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam APBA;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*2. Undang-Undang...../2*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);

*13. Peraturan ...../3*

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Penyaluran belanja bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh merupakan bagian dana otonomi khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2015.

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp3.011.341.217.084,00 (tiga triliun sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan puluh empat rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu ;

a. Tahap I disalurkan sebanyak Rp903.402.365.125,00 atau 30% (tiga puluh persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran I;

b. Tahap II disalurkan sebanyak Rp1.355.103.547.688,00 atau 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran I;

c. Tahap III disalurkan sebanyak Rp752.835.304.271,00 atau 25% (dua puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran I;

*(2) Tahapan ...../4*

(2) Tahapan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi dana otonomi khusus dimaksud diterima oleh Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau masing-masing sebagai berikut :

a. Tahap I paling lambat pada bulan April 2015;
b. Tahap II paling lambat pada bulan Juni 2015; dan
c. Tahap III paling lambat pada bulan September 2015.

Pasal 4

(1) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut :

a. Peyaluran Tahap I :
   1) Surat Pengantar;
   2) Kwitansi Tanda Terima;
   3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
   4) Rekapitulasi Alokasi dan **Realisasi Dana Otonomi Khusus** Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
   5) Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
   6) Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
   7) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Urusan dan Organisasi** tahun Anggaran 2015;
   8) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2015;
   9) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015;
b. Penyaluran Tahap II;
   1) Surat Pengantar;
   2) Kwitansi Tanda Terima,
   3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
   4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
   5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Bidang** Tahun Anggaran 2015;
c. Penyaluran Tahap III.
   1) Surat Pengantar;
   2) Kwitansi Tanda Terima;
   3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;

*4) Rekapitulasi ...../5*

4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Urusan dan Organisasi tahun Anggaran 2015;

5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Bidang** Tahun Anggaran 2015;

(2) Format dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8 masing-masing tercantum pada lampiran II, lampiran III, lampiran IV, Lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sesuai tahapan masing-masing penyaluran.

Pasal 5

Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Dinas Keuangan Aceh berdasarkan Surat Permintaan Transfer dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

(2) Surat Permintaan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut :

a. Rekomendasi, dan

b. Kwitansi Tanda Terima,

(3) Format Surat Permintaan Transfer dan Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima transfer belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.

(2) Format dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

***Pasal 8 ...../6***

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 April 2015
8 Ra'jab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 April 2015
8 Ra'jab 1436

SEKRETARIS DAERAH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 10

**LAMPIRAN I**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 19 TAHUN 2015**
**TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | DAERAH | TOTAL OTSUS TAHUN ANGARAN 2015 | PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
| | | | SEBESAR 30% | SEBESAR 45% | SEBESAR 25% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aceh Barat | 125.447.783.438 | 37.634.335.031 | 56.451.502.547 | 31.361.945.860 |
| 2 | Aceh Besar | 147.914.490.241 | 44.374.347.072 | 66.561.520.608 | 36.978.622.560 |
| 3 | Aceh Selatan | 156.731.647.778 | 47.019.494.333 | 70.529.241.500 | 39.182.911.945 |
| 4 | Aceh Singkil | 116.337.845.137 | 34.901.353.541 | 52.352.030.312 | 29.084.461.284 |
| 5 | Aceh Tengah | 153.029.242.798 | 45.908.772.839 | 68.863.159.259 | 38.257.310.700 |
| 6 | Aceh Tenggara | 194.829.969.574 | 58.448.990.872 | 87.673.486.308 | 48.707.492.394 |
| 7 | Aceh Timur | 203.304.448.098 | 60.991.334.429 | 91.487.001.644 | 50.826.112.025 |
| 8 | Aceh Utara | 132.384.928.052 | 39.715.478.416 | 59.573.217.623 | 33.096.232.013 |
| 9 | Bireuen | 126.659.178.409 | 37.997.753.523 | 56.996.630.284 | 31.664.794.602 |
| 10 | Pidie | 154.825.046.044 | 46.447.513.813 | 69.671.270.720 | 38.706.261.511 |
| 11 | Simeulue | 108.490.033.837 | 32.547.010.151 | 48.820.515.227 | 27.122.508.459 |
| 12 | Banda Aceh | 117.110.295.941 | 35.133.088.782 | 52.699.633.173 | 29.277.573.985 |
| 13 | Sabang | 62.331.350.724 | 18.699.405.217 | 28.049.107.826 | 15.582.837.681 |
| 14 | Langsa | 81.926.615.347 | 24.577.984.604 | 36.866.976.906 | 20.481.653.837 |
| 15 | Lhokseumawe | 73.902.055.739 | 22.170.616.722 | 33.255.925.083 | 18.475.513.935 |
| 16 | Nagan Raya | 145.845.274.513 | 43.753.582.354 | 65.630.373.531 | 36.461.318.628 |
| 17 | Aceh Jaya | 158.425.915.563 | 47.527.774.669 | 71.291.662.003 | 39.606.478.891 |
| 18 | Aceh Barat Daya | 111.439.098.930 | 33.431.729.679 | 50.147.594.519 | 27.859.774.733 |
| 19 | Gayo Lues | 200.855.367.107 | 60.256.610.132 | 90.384.915.198 | 50.213.841.777 |
| 20 | Aceh Tamiang | 126.829.640.443 | 38.048.892.133 | 57.073.338.199 | 31.707.410.111 |
| 21 | Bener Meriah | 111.916.310.575 | 33.574.893.173 | 50.362.339.759 | 27.979.077.644 |
| 22 | Pidie Jaya | 96.640.402.805 | 28.992.120.842 | 43.488.181.262 | 24.160.100.701 |
| 23 | Subulussalam | 104.164.275.991 | 31.249.282.797 | 46.873.924.196 | 26.041.068.998 |
| | **TOTAL** | **3.011.341.217.084** | **903.402.365.125** | **1.355.103.547.688** | **752.835.304.271** |

GUBERNUR ACEH,

Zaini Abdullah

**ZAINI ABDULLAH**

**LAMPIRAN II**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...**
**SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN**
**Nomor : .....**

## SURAT PENGANTAR

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Aceh
c.q Kepala Dinas Pendapatan
dan Kekayaan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, selanjutnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor:..... Tahun 2015 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (*) Tahap I/II/III (**) sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran :
b. Jumlah Alokasi Terbilang : Rp.
c. Jumlah pembayaran yang diminta Terbilang : Rp.
d. Nama dan Nomor Rekening Bank :

....., .....
Bupati/Walikota...,

.....

*Tembusan :*

1. Ketua DPRK di.....
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas Keuangan.....
4. Inspetorat.....
5. Kabag pembangunan
6. Pertinggal

Note : (*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan.

**LAMPIRAN III**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

NO. :
M.A. :
Tahun :

**ASLI**
**KEDUA**
**KETIGA**
**KEEMPAT**

# TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : ..... **xxxxxxxxxxxxxxxxx** .....

**YAITU** : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (*) Tahap I/II/III (**) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2015 tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2015

Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran PPKA
Dinas Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199903 1 002

....., .....
**Yang Menerima**

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

**Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxx**

Barang [2]/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang [2]/ pekerjaan

(_____)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Susilawati, S.Sos
NIP. 19740424 199403 2 003

Note : (*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan.
xxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima

**LAMPIRAN IV**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

# SURAT PERNYATAAN
# TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Saya yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota ..... dengan ini menyatakan bahwa .

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Penyaluran Dana Otsus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebesar .....,- (.....rupiah ) untuk penyaluran Tahap I/II/III (*) dari total dana sebesar Rp. ..... ( Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: ..... Tahun 20..... tanggal .... tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Keuangan Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan, disampaikan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

BUPATI/WALIKOTA

Note : (*) disesuaikan menurut tahapan.

.....(N a m a).....

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

## REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA PER BIDANG TAHUN ANGGARAN .....1)

**Kabupaten/Kota** :

| NO. | URAIAN | PENYALURAN TAHAP I | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN ..... (n-1) | | | |
| | | ALOKASI ANGGARAN (Rp.) | REALISASI S/D TAHAP SEBELUMNYA (Rp.) | PROSENTASE (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| 1 | BIDANG INFRASTRUKTUR | | | | |
| | a. Program Kegiatan | | | | |
| | b. Program Kegiatan | | | | |
| | | | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI | | | | |
| | a. Program Kegiatan | | | | |
| | b. Program Kegiatan | | | | |
| | | | | | |
| 3 | BIDANG ..... | | | | |
| | a. Program Kegiatan | | | | |
| | b. Program Kegiatan | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

**Keterangan**
1) Diisi tahun dengan tahun anggaran
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut bidang
Kolom (2) Diisi dengan bidang-bidang
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran per bidang, program dan kegiatan tahun anggaran berkenaan
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran sampai dengantahap sebelumnya pada tahunanggaran berkenaan
Kolom (6) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan tahap sebelumnya dengan alokasi anggaran (kolom 4 : kolom 3 x 100%)
Kolom (6) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

.....,.....20..
a.n. Bupati/Walikota.....
Sekretaris Daerah

(.....)

**LAMPIRAN VI**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH**
**KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

## REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
## BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2014

**KAB/KOTA :**

| NO | KODE REKENING | PROGRAM /KEGIATAN | JUMLAH ALOKASI (Rp) | BOBOT (%) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | | | |
| | | | | | % | TTB | (Rp) | (%) | TTB | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**PETUNJUK PENGISIAN :**

Tahun : diisi dengan tahun anggaran untuk program/kegiatan
Bulan : diisi dengan bulan ....
SKPA/SKPK : diisi sesuai dengan nama SKPA/SKPK terkait
Kab/Kota : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
Kolom 2 : diisi dengan nomor rekening program/kegiatan
Kolom 3 : diisi sesuai nama program/paket kegiatan
Kolom 4 : diisi dengan jumlah alokasi anggaran/pagu untuk kegiatan
Kolom 5 : diisi dengan ....
Kolom 6 : diisi dengan....
Kolom 7 : diisi dengan...
Kolom 8 : diisi dengan...
Kolom 9 : diisi dengan...

..... .....

BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

**FORMAT CONTOH**

## REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA

Tahun Anggaran : 2015
Kabupaten/Kota : .....
Pagu OTSUS : 17.500.000.000

| NO | KODE REKENING | SKPK/PROGRAM/KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | | | | | JUMLAH ALOKASI | BOBOT (%) | LOKASI | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No | Uraian | Vol | Satuan | Harga Satuan | (Rp) | | PAKET | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (6x8) | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *1. 04.* | ***Dinas Cipta Karya*** | | | | | | ***12.500.000.000*** | ***71,43*** | | |
| | ***1. 04. xx.15.*** | ***Program Pengembangan Perumahan*** | | | | | | ***12.500.000.000*** | ***71,43*** | | |
| | *1. 04. xx.15.07* | *Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana* | | | | | | *12.500.000.000* | *71,43* | | |
| | | | *1* | *Pembangunan Rumah Sehat type 36* | *50* | *Unit* | *54.000.000* | *2.700.000.000* | *15,43* | | |
| | | | *2* | *Pembangunan Rumah Sehat type 56* | *100* | *Unit* | *98.000.000* | *9.800.000.000* | *56,00* | | |
| | | | ***3*** | ***dst*** | | | | | | | |
| *2* | *1.13.* | ***Dinas Sosial*** | | | | | | *5.000.000.000* | *28,57* | | |
| | ***1. 13. xx.18.*** | ***Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma*** | | | | | | ***2.000.000.000*** | ***11,43*** | | |
| | *1. 13. xx.18.02* | *Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para* | | | | | | *2.000.000.000* | *11,43* | | |
| | | | *1* | *Pembangunan Gedung Perawatan dan Trauma penyandang cacat* | *1* | *Unit* | *2.000.000.000* | *2.000.000.000* | *11,43* | | |
| | | | *2* | *dst* | | | | | | | |
| | | ***Pembinaan panti asuhan/panti jompo*** | | | | | | ***3.000.000.000*** | ***17,14*** | | |
| | | *Rehab sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo* | *1* | *Rehab sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo* | *1* | *Unit* | *3.000.000.000* | *3.000.000.000* | *17,14* | | |
| | | | ***2*** | ***dst*** | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | | | **17.500.000.000** | **100** | | |

**PETUNJUK PENGISIAN :**

Tahun : diisi dengan tahun anggaran untuk program/kegiatan
Kab/Kota : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
Pagu : diisi sesuai dengan pagu Otsus masing-masing Kabupaten/Kota
No : diisi dengan nomor urut
Kode rekening : diisi dengan Kode SKPK, Kode Program/Kegiatan
Nama SKPK/Program/ : diisi dengan Nama SKPK/Program/Kegiatan
Rincian Kegiatan : diisi dengan nama uraian rincian kegiatan yang di anggarkan
Jumlah alokasi : diisi sesuai dengan alokasi kegiatan dan rincian kegiatan
Bobot : diisi dengan jumlah bobot yang dianggarkan dalam pelaksanaan kegiatan
Keterangan : diisi dengan penjelasan yang diperlukan

....., .....
BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

## REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN URUSAN DAN ORGANISASI
## TAHUN ANGGARAN : .....1)

Kabupaten/kota :
PENERIMAAN : Rp. .....2)

| NO. | KODE REKENING | | URAIAN | PENYALURAN TAHAP I | | | | | PENYALURAN TAHAP II | | PENYALURAN TAHAP III | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN ..... (n-1) | | | TAHUN .... (n) | | TAHUN .... (n) | | TAHUN .... (n) | | |
| | | | | ALOKASI ANGGARAN (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | PROSENTASE (%) | ALOKASI ANGGARAN (Rp.) | PROSENTASE (%) | ALOKASI ANGGARAN Tahap I (Rp.) | REALISASI Tahap I (Rp.) | ALOKASI ANGGARAN Tahap II (Rp.) | REALISASI Tahap II (Rp.) | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota ... | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | | Urusan Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | 01 | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | 1,02 | | Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | 1,02 | 01 | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | 1,02 | 02 | RSUD .... | | | | | | | | | | |
| | 1,02 | 03 | RSJ ... | | | | | | | | | | |
| | 1,02 | 04 | dst... | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | dst... | | | | | | | | | | |
| ... | | | dst | | | | | | | | | | |
| | | | JUMLAH | | | | | | | | | | |

**Keterangan:**
1) Diisi Tahun Anggaran berkenaan (Tn)
2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi nomor kode rekening yaitu kolom kesatu kode urusan pemerintahan dan kolom kedua kode organisasi.
Kolom (3) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan organisasi
Kolom (4) Diisi dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (5) Diisi dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (6) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (7) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan
Kolom (8) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran untuk daerah provinsi/kabupaten/kota atau nama lain dengan jumlah alokasi anggaran Dana Otsus tahun anggaran berkenaan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (11) Diisi dengan alokasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (12) Diisi dengan realisasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

.....,.....20..
a.n. Bupati/Walikota.....
Sekretaris Daerah

(.....)

**LAMPIRAN IX**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH**
**KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

## REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN BIDANG
## TAHUN ANGGARAN .....1)

Kabupaten/kota :
PENERIMAAN : Rp. .....2)

| NO. | URAIAN | PENYALURAN TAHAP I | | | | PENYALURAN TAHAP II | | PENYALURAN TAHAP III | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN ..... (n-1) | | | TAHUN .... (n) | TAHUN .... (n) | | TAHUN .... (n) | | |
| | | ALOKASI ANGGARAN (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | PROSENTASE (%) | ALOKASI ANGGARAN (Rp.) | ALOKASI ANGGARAN Tahap I (Rp.) | REALISASI Tahap I (Rp.) | ALOKASI ANGGARAN Tahap II (Rp.) | REALISASI Tahap II (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | BIDANG INFRASTRUKTUR | | | | | | | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT | | | | | | | | | |
| 3 | BIDANG PENGETASAN KEMISKINAN | | | | | | | | | |
| 4 | BIDANG PENDANAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | |
| 5 | BIDANG PENDANAAN SOSIAL | | | | | | | | | |
| 6 | BIDANG PENDANAAN KESEHATAN | | | | | | | | | |
| 7 | BIDANG PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | |

**Keterangan**
1) Diisi Tahun Anggaran sebelumnya (Tn)
2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi nomor kode rekening yaitu kolom kesatu kode urusan pemerintahan dan kolom kedua kode organisasi.
Kolom (3) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan organisasi
Kolom (4) Diisi dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (5) Diisi dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (6) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (7) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan
Kolom (8) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran untuk daerah provinsi/kabupaten/kota atau nama lain dengan jumlah alokasi anggaran Dana Otsus tahun anggaran berkenaan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (11) Diisi dengan alokasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (12) Diisi dengan realisasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

**LAMPIRAN X**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

***KOP DINAS***

Banda Aceh, .....

Nomor :
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Surat Permintaan Transfer**

Yang Terhormat :
Saudara Kepala Dinas Keuangan Aceh
di -
**Banda Aceh**

Menindaklanjuti maksud Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor .... Tahun ..... tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015, kami mohon agar Kepala Dinas Keuangan Aceh dapat mentransfer Dana Otonomi Khusus tahap ...*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota....**) sebesar Rp..... (..dh..).

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Rekomendasi Nomor ..... tanggal.....
b. Kwitansi Tanda Terima yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota...***)

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAN KEKAYAAN ACEH,

**NAMA .....**
PANGKAT .....
NIP.....

***Tembusan :***

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan) di Banda Aceh ;
2. Pertinggal.

***Keterangan*** :
*) sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
**) Kabupaten/Kota berkenaan.
***) Bupati/Walikota berkenaan

**LAMPIRAN XI**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

***KOP DINAS***

# REKOMENDASI

NOMOR.....

Dalam rangka menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, merekomendasikan sebagai berikut :

a. Bahwa Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap....)* tahun anggaran 2015, telah ditransfer dari kas umum negara ke kas umum Aceh pada tanggal ..... sesuai dengan .....

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan penyaluran dana otsus tahap .....*) tahun anggaran 2015, sebagaimana maksud surat dari Bupati/Walikota .....**) Nomor …….. Tanggal ……., setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan (revisi) amanat Kepmendagri No. 061-930 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 061-480 Tahun 2011 tentang Nama dan Kode Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses penyaluran sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan lampiran I Peraturan Gubernur Aceh Nomor .... Tahun 2015 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015, kami mohon kepada Saudara Kepala Dinas Keuangan Aceh supaya dapat disalurkan Dana Otonomi Khusus dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota....**) tahap .....*) sebesar Rp..... (.....dh.....) melalui kode rekening .....)***.

Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAN KEKAYAAN ACEH,

**NAMA .....**
PANGKAT.....
NIP .....

***Keterangan*** :
*) sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
**) Bupati/Walikota berkenaan.
***) kode rekening kas daerah kabupaten/kota berkenaan

**LAMPIRAN XII**
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**
**NOMOR 10 TAHUN 2015**
**PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

# Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : **Rp. .....**
Terbilang :
.....rupiah
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (*) Tahap I/II/III (**) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2015 tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2015

Dengan Rincian

| JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS | JUMLAH | Diterima Tanggal |
|---|---|---|
| DANA OTONOMI KHUSUS | : Rp | Tgl ..... |
| SUB JUMLAH PENYALURAN OTONOMI KHUSUS | : Rp - | |

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Cabang .....

....., .....

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

**Nama**
NIP .....